BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Berikut beberapa pengertian SIMDA dari para ahli yaitu :

Menurut Khoirul Anwar (2004:112) dalam mendefinisikan SIMDA dalam bukunya dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Manajemen bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah SIMDA yaitu:

> "SIMDA adalah sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi secara baik.

Sedangkan pengertian SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah menurut Djaja (2009), menyatakan bahwa :

> "Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi *database* yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja

> Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan".

Dari definisi di atas, SIMDA merupakan aplikasi sistem informasi yang dimiliki tiap daerah kabupaten, kota, dan profinsi. SIMDA mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi di semua jajaran Pemerintahan Daerah sesuai dengan sistem informasi yang telah ditentukan.

3.1.2 Barang Milik Daerah

Barang milik daerah (BMD) merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan baik dan benar sesuaidengan peraturan peerundangan yang berlaku. Adapun pengertian barang milik daerah menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut :

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010:158) menyatakan bahwa baarang milik daerah seperti berikut :

> "Aset atau barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta bagian-bagianya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya".

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa :

> “Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari:

a. Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaanya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha milik Daerah lainnya.

Barang milik negara/daerah digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu:

1) KIB-A; Tanah

Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam dan lain-lain

2) KIB-B; Peralatan dan Mesin

a) Alat-alat besar

b) Alat-alat angkutan

c) Alat-alat bengkel dan alat ukur

d) Alat-alat pertanian/peternakan

e) Alat-alat kantor dan rumah tangga

f) Alat studio dan alat komunikasi

g) Alat-alat kedokteran

h) Alat-alat laboratorium

i) Alat-alat keamanan

3) KIB-C; Gedung dan bangunan

a) Bangunan gedung

b) Bangunan monumen

4) KIB-D; Jalan, irigasi dan jaringan

5) KIB-E; Aset tetap lainnya

a) Buku dan perpustakaan

b) Barang bercorak kesenian/kebudayaan

c) Hewan/ternak dan tumbuhan

6) KIB-F; Kontruksi dalam pengerjaan

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perolehan lainnya yang sah untik dimanfaatkan oleh pemerintah atau masyarakat

3.1.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Menurut Mohammad Ramadhan (2014) menyatakan bahwa :

> "SIMDA-BMD merupakan tool dalam pengelolaan barang milik daerah yang mengacu ke Permendagri 17 tahun 2007".

Menurut Satgas Pengembangan SIMDA (2008) menyatakan bahwa :

> "Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah".

Dan adapun *output* aplikasi ini antara lain :

1) Perencanaan

Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

2) Pengadaan

Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.

3) Penatausahaan

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

4) Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan

5) Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

Pembahasan yang akan diuraikan adalah berdasarkan identifikasi masalah dari tinjauan yang dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, khususnya Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah.

Pengadaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan barang, seperti efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

SIMDA-BMD merupakan sistem akuntansi keuangan berbasis komputer yang dapat membantu pemerintah daerah untuk menghasilkan informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya, dan juga dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan barang dan aset pemerintah daerah.

.

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA-BMD Pada DPKAD Kota Bandung

Pengadaan barang milik daerah merupakan salah satu kegiatan yang dicatat dalam kartu inventaris barang. Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

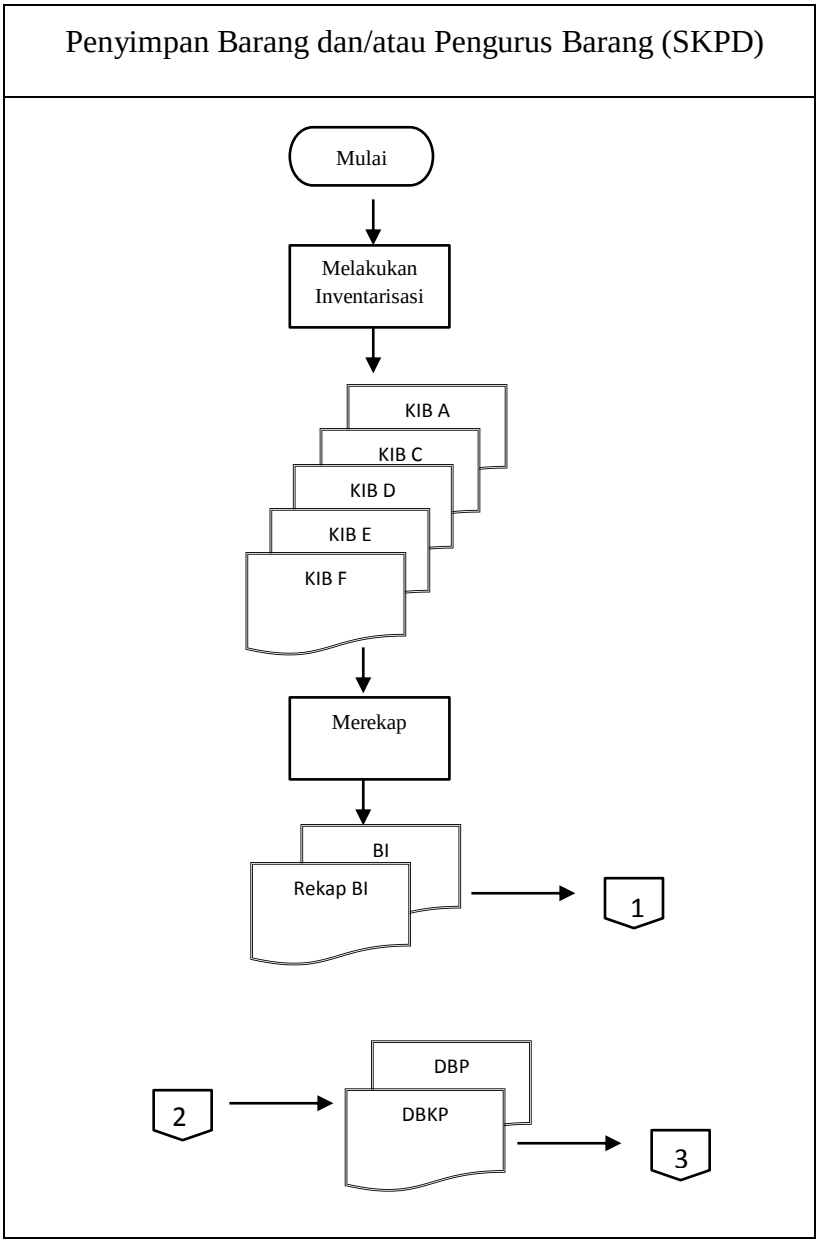
a. pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;

b. usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;

c. menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

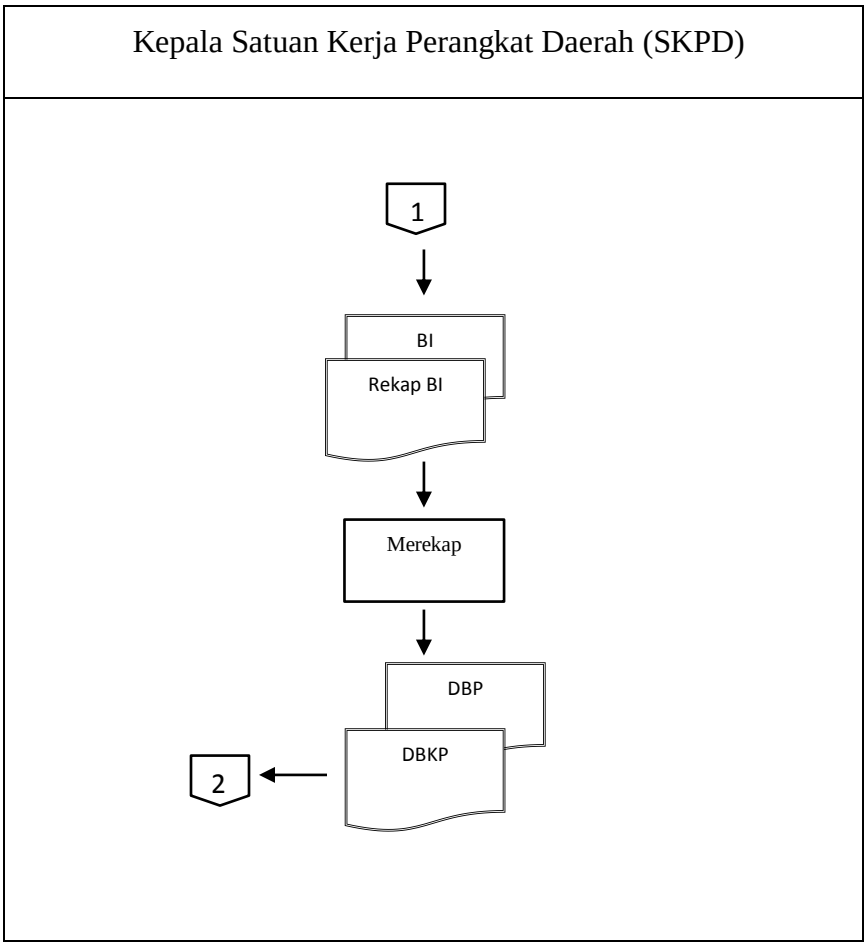
Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan dan lain-lain.

Berikut adalah Bagan Arus (*Flowchart*) proses pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) secara sederhana:



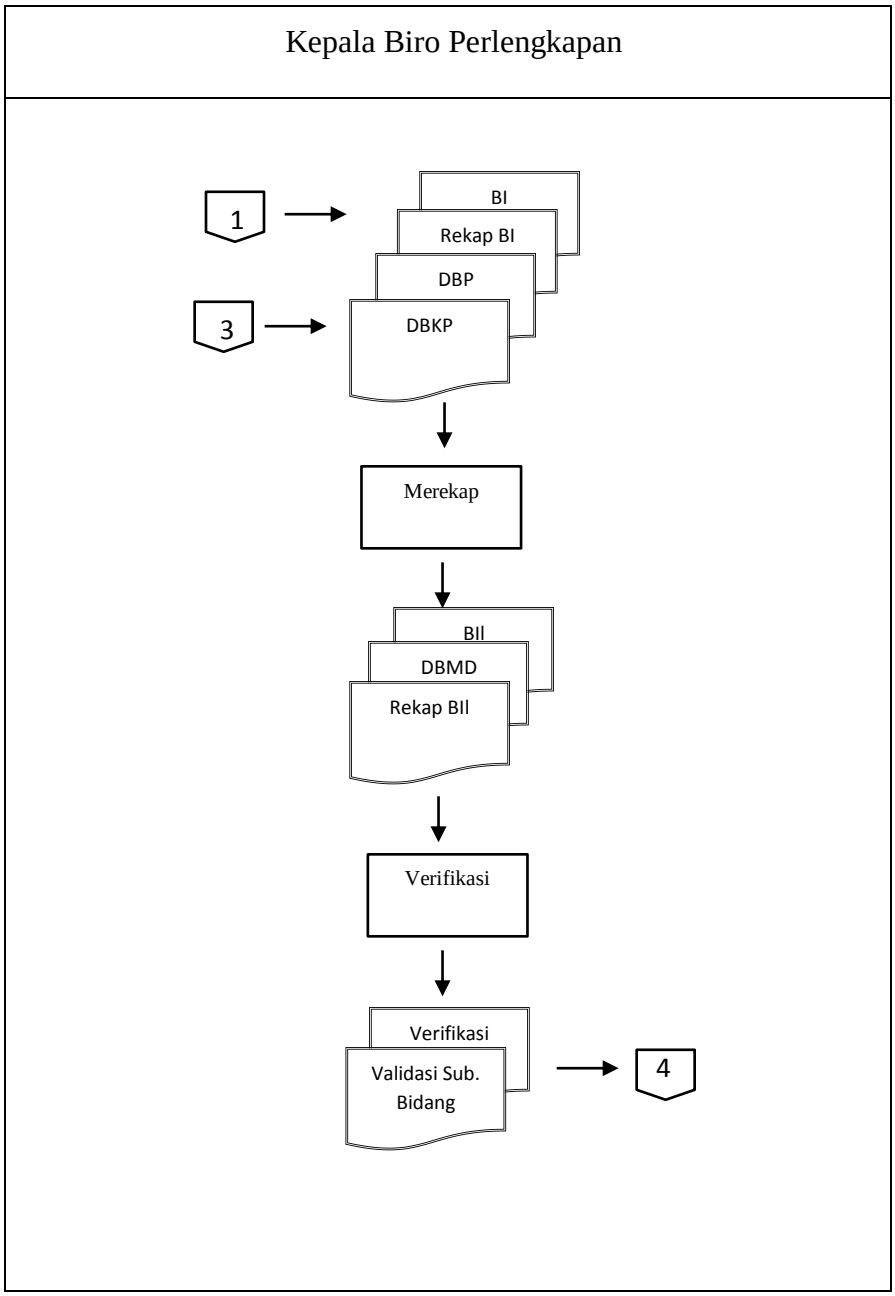
Gambar 3.1

Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah



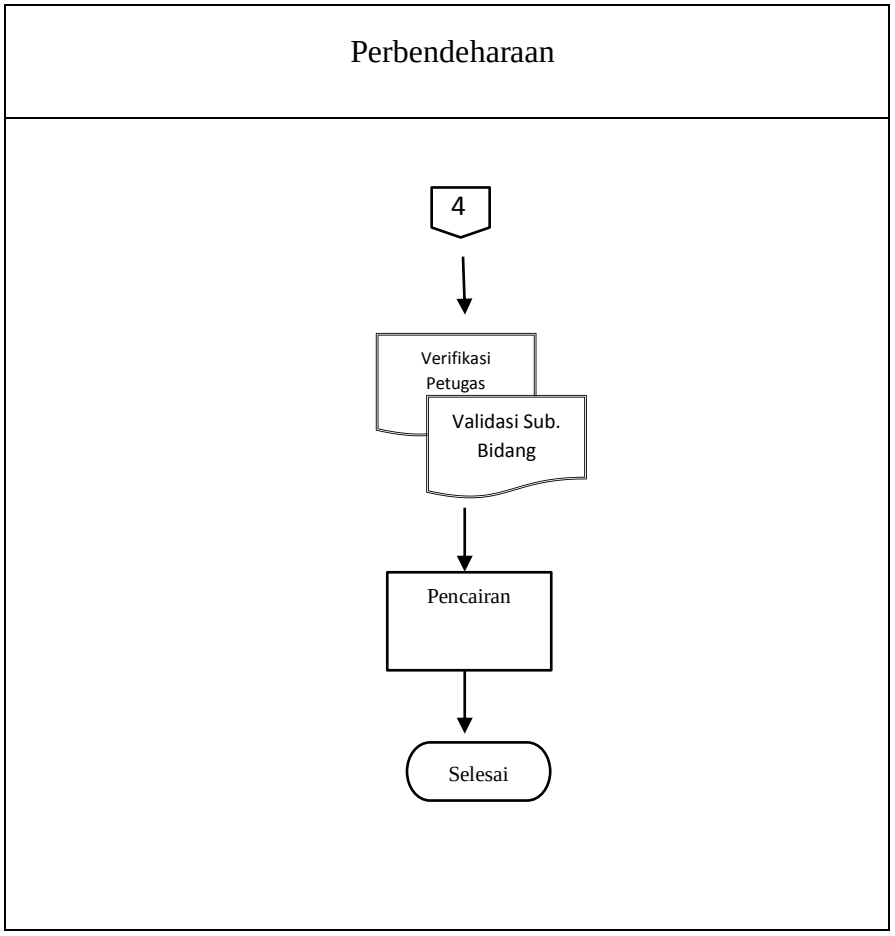
Gambar 3.2

Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah



Gambar 3.3

Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah



Gambar 3.4

Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah

Keterangan :

KIB : Karti Inventaris Barang

BI : Buku Inventaris

DBP : Daftar Barang Pengguna

DBKP : Daftar Barang Kuasa Pengguna

BII : Buku Induk Inventaris

DBMD : Daftar Barang Milik Daerah

Kemudian berikut adalah penjabaran dari Bagan Arus (Flowchart) diatas secara lebih sederhana :

1. Bagian penyimpan atau pengurus barang SKPD

   Bagian penyimpan atau pengurus barang SKPD melakukan penginputan inventarisasi KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, dan/atau KIB F yang terdapat di SKPD nya masing - masing. Dan setelah itu pengurus barang merekap ke Buku Inventaris dan diberikan kepada Kepala SKPD dan akan diberikan DBP (Daftar Barang Pengguna) dan DBKP (Daftar Barang Kuasa Pengguna) oleh Kepala SKPD untuk diberikan kepada Bagian Kepala Biro Perlengkapan seperti gambar 3.1.

.

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerima hasil rekap dari pengurus barang lalu merekapnya kembali dan membuat laporan/surat DBP (Daftar Barang Pengguna) dan DBKP (Daftar Barang Kuasa Pengguna) lalu diberikan kepada Bagian penyimpan atau pengurus barang SKPD untuk disampaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan seperti gambar 3.2 .

3. Kepala Biro Perlengkapan

Kepala Biro Perlengkapan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD. Kepala Biro Perlengkapan menerima Buku inventarisasi dan hasil rekapnya dan juga hasil laporan/surat DBP (Daftar Barang Pengguna) dan DBKP (Daftar Barang Kuasa Pengguna) dari Bagian penyimpan atau pengurus barang SKPD, lalu Kepala Biro Perlengkapan merekap semua hasil laporan BI,BII,DBP dan DBKP, lalu hasilnya menjadi Buku Induk Inventaris (BII) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), lalu Kepala Biro Perlengkapan akan membuat dokumen verifikasi dan validasi Sub. Bidang untuk di berikan kepada Perbendaharaan seperti gambar 3.3.

4. Perbendaharaan

Perbendaharaan menerima beberapa dokumen yaitu dokumen verifikasi dan validasi Sub. Bidang yang sebelumnya telah di paraf oleh petugas SIMDA Kota, karena perolehan / paraf petugas sebagai dasar memperoleh pencairan seperti gambar 3.4.

5. Selesai.

3.1.1.1 Hambatan Atas Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA-BMD Pada DPKAD Kota Bandung

Dalam prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA-BMD terdapat beberapa hambatan yan terjadi, yaitu :

1. Kesalahan dalam proses *input* data
2. Sistem masih menggunakan *Semi-Line*

3.1.1.2 Upaya Atas Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA-BMD Pada DPKAD Kota Bandung

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA-BMD adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rekonsiliasi atau koreksi pada akhir periode tersebut dan meningkatkan kualitas pelaksana

2. Meminta kepada pihak programmer/bagian kompeterisasi untuk menggantikan versi SIMDA-BMD ke yang lebih baik.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA-BMD Pada DPKAD Kota Bandung

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik negara dan daerah serta mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, DPKAD Kota Bandung pemerintah telah menggunakan salah satu aplikasi keuangan daerah yaitu SIMDA – BMD (Sistem Manajemen Daerah – Barang Milik daerah) agar tata kelola pengelolaan barang milik negara/daerah menjadi lebih baik baik.

Sejalan juga dengan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik negara dan daerah, pemerintah telah menerbitkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penggolongan inventarisasi barang telah sesuai dengan aturan Permendagri No. 17 Tahun 2007 yang dibedakan menjadi 6 golongan berdasarkan jenis barang. Pelaporan memuat gabungan kartu inventaris barang ke dalam Buku Induk Inventaris serta penggunaan aplikasi SIMDA dimana rekapitulasi barang dari masing-masing SKPD dapat terpantau sehingga tercapainya transparansi dan akuntabilitas untuk memberikan kepuasan bagi para *stakeholder* dalam mengetahui informasi dari pengelolaan barang milik daerah.

SIMDA - BMD digunakan agar menghasilkan informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya, dan dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan barang dan aset pemerintah daerah. Program Aplikasi Komputer SIMDA – BMD ini pada dasarnya digunakan untuk melakukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan pengendalian barang milik daerah, menuntut adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Aplikasi SIMDA – BMD merupakan aplikasi untuk mengendalikannya, karena apabila SKPD tidak melakukan pencatatan di kartu inventaris barang secara lengkap dan tidak mendapat bukti eksport maka SKPD tersebut tidak bisa melakukan pencairan..

DPKAD selaku pembantu pengelola, salah satu tugasnya adalah menggabungkan daftar barang inventaris seluruh SKPD di Kota Bandung. Proses menggabungkan dilakukan melalui kegiatann eksport import. Pertama, pengurus barang SKPD datang ke DPKAD untuk mengeksport data, lalu petugas SIMDA – BMD melakukan import data. Adapun proses eksport import data melalui SIMDA - BMD sebagai berikut:

1. Tampilan awal SIMDA-BMD



Gambar 3.5

Tampilan Awal SIMDA-BMD

Menu pilihan File pada Program Aplikasi Komputer SIMDA-BMD adalah menu pilihan untuk mengontrol aplikasi, yang terdiri dari :

a. Login

b. *Logout*

c. Ganti *Password*

d. *Setting User*

e. *Keluar*

a. *Login*

Menu pilihan *Login* adalah menu pilihan yang harus dipilih untuk mengaktifkan aplikasi dengan nama *user* dan *password* tertentu. Langkahnya adalah sebagai berikut:

- Klik *menu bar File*, selanjutnya pilih dan klik pilihan *Login* pada form utama, untuk menampilkan form Dialog *Password* seperti di bawah ini :



Gambar 3.6

Tampilan *Login*

Atau pada saat membuka aplikasi pertama kali secara otomatis akan tampil *form* dialog *password.*

- Masukkan nama *user* pada kotak inputan Nama *User* dan password pada kotak inputan *Password.*
- Masukkan tahun periode akuntansi
- Tekan tombol *login* untuk memproses verifikasi gabungan nama *user , password,* dan tahun.

- Tekan tombol batal untuk membatalkan dan menutup *form* tanpa masuk ke aplikasi.
- Jika nama user dan password yang dimasukkan benar maka user dapat menggunakan aplikasi ini.

b. Logout

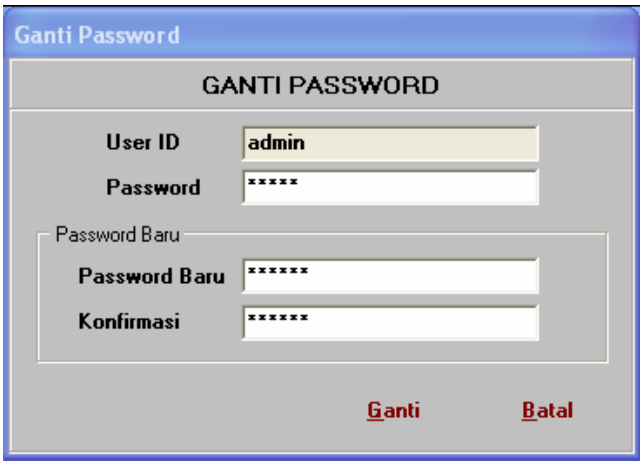
Menu pilihan *Logout* pada Program Aplikasi SIMDA BMD adalah untuk *Logout* atau keluar dari aplikasi ini dan dapat masuk kembali dengan *user*, tahun yang berbeda atau *user* yang sama, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- Klik *menu bar File*
- Klik menu pilihan *Logout* atau langsung klik ikon pada windows utama, maka dengan sendirinya aplikasi akan kembali ke kondisi awal pada saat aplikasi tersebut diaktifkan.

c. Ganti *Password*

Menu pilihan Ganti *Password* pada Program Aplikasi SIMDA BMD adalah menu pilihan yang digunakan untuk melakukan perubahan *password* oleh *user* jika diinginkan, *langkahnya adalah sebagai berikut:*

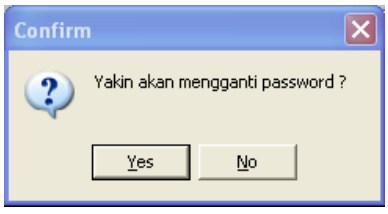
- *Klik menu* bar File
- Selanjutnya pilih dan klik pilihan Ubah *Password* atau klik ikon pada *windows* utama, untuk menampilkan halaman *Dialog Password* seperti di bawah ini :



Gambar 3.7

Ganti Password

- Kotak edit akan tampil secara otomatis *user* yang *login* atau sedang menggunakan Program Aplikasi SIMDA, masukkan *password* yang akan diganti pada kotak *edit* .
- Masukkan *password* baru pada kotak *edit* dan masukkan *password* baru kembali pada kotak *edit* harus sama dengan *password* yang dimasukkan pada kotak *edit password* baru.
- Tekan tombol untuk memproses perubahan *password* akan muncul konfirmasi berikut :



Gambar 3.8

Konfirmasi Ganti *Password*

- apabila perubahan *password* berhasil maka akan tampil konfirmasi sebagai berikut :



Gambar 3.9

Konfirmasi Berhasil Ganti *Password*

d. *Setting User*

Menu pilihan *Setting User* pada aplikasi adalah menu pilihan yang digunakan untuk melakukan transaksi pada data *user name* yang hanya dapat dilakukan oleh *user* yang *login* pada level *administrator*. *Menu* ini dapat menambah *user* dengan pembatasan *level*, unit dan sub unit yang dapat buka. Langkahnya adalah sebagai berikut :

e. Keluar

Menu pilihan Keluar pada Aplikasi SIMDA adalah Fungsi pilihan untuk keluar dari sistem aplikasi ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- Klik *menu bar File*
- Pilih dan klik pilihan Keluar

2. *Eksport Import* Data

Setelah terlebih dahulu melakukan *Log In* pada aplikasi SIMDA tersebut, petugas bisa memulai untuk melakukan *eksport import* data agar semua barang milik daerah dapat terawasi dan terkendali. Berikut adalah tampilan menu utama pada aplikasi SIMDA untuk *eksport import* data.



Gambar 3.10

***Eksport Import* Data**

Menu ini digunakan untuk *eksport import* data antar unit organisasi sampai dengan antar UPB. Untuk melakukan *ekspor impor* data langkahnya sebagai berikut :

1) Klik menu ekspor data maka akan tampil halaman sebagai berikut :



Gambar 3.11

Pengisian *Eksport Import* Data

Terdapat 6 macam KIB pada tampilan tersebut, yaitu :

1. KIB-A: Tanah,

2. KIB-B: Mesin dan Peralatan

3. KIB-C: Gedung dan Bangunan

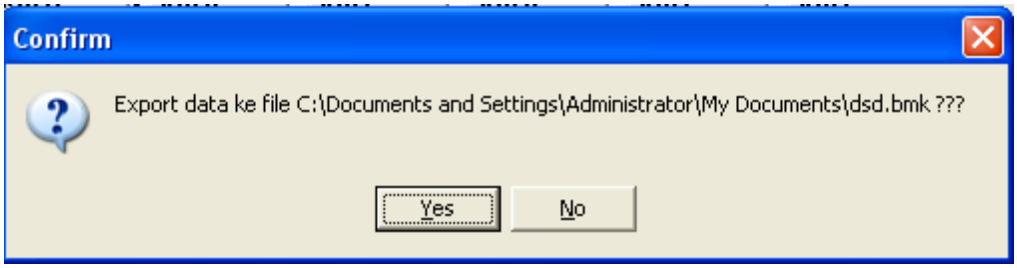
4. KIB-D: Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. KIB-E: Aset Tetap Lainnya

6. KIB-F: Konstruksi dalam Pengerjaan

2) Klik untuk data yang akan di *eksport*, kemudian pilihlah nama file yang *berekstension* .bmk, dan pilihlah unit organisasi yang dikehendaki.

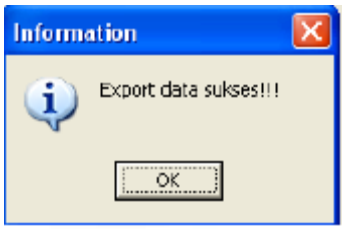
3) Untuk melakukan *eksport* tekan tombol , sampai muncul tampilan seperti berikut ini :



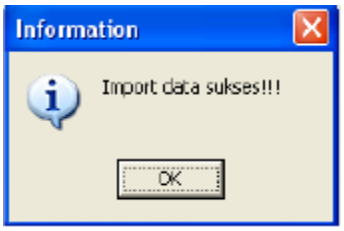
Gambar 3.12

Tampilan Konfirmasi *Eksport Import* data

Jika berhasil maka akan muncul



atau



Gambar 3.13

Tampilan *Eksport Import* Data Selesai

Ekspor Pengadaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah.

3.2.2.2 Hambatan atas Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA-BMD Pada DPKAD Kota Bandung

1. Kesalahan dalam proses *input* data

   Hambatan yang pertama yaitu kesalahan dalam proses *input* data kesalahan tersebut sering diakibatkan karena kurangnya daya konsentrasi dari Operator dikarenakan faktor Fisik (Kelelahan) dan Psikologis.

2. Sistem masih menggunakan *Semi-Line*

   Hambatan yang kedua yaitu Sistem masih menggunakan *Semi-Line,* Cara koneksi aplikasi SIMDA-BMDv1 antara DPKAD dan SKPD masih secara *semi line,* dimana DPKAD menyiapkan *server* dan beberapa *Client* SKPD menginput data ke DPKAD dengan dibagi jadwal per beberapa SKPD sebanyak client yang disediakan. Jadi setiap SKPD menginputkan segala sesuatu di SIMDA, pengurus barang (SKPD) diharuskan mendatangi petugas SIMDA Kota untuk melapor.

3.2.2.3 Upaya atas Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA-BMD Pada DPKAD Kota Bandung

1. Melakukan rekonsiliasi dan meningkatkan kualitas pelaksana

    - Jadi pertama akan melakukan rekonsiliasi untuk menghitung selisih dan setelah menemukan selisih tersebut, nanti akan terjadi klasifikasi ulang setelah itu persetujuan untuk menentukan seslisih tersebut akan masuk pada golongan apa pada saat pencatatan ulang setelah itu akan masuk pada jurnal penyesuaian.
    - Yang kedua, adalah meningkatkan kualitas pelaksana dengan cara menentukan kualifikasi untuk pelaksana SIMDA – BMD untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan mewajibkan pelaksana SIMDA mengikuti pelatihan / seminar / BIMTEK mengenai SIMDA

3. Meminta kepada pihak programmer/bagian kompeterisasi untuk menggantikan versi SIMDA-BMD ke yang lebih baik.

Untuk mengatasi hambatan yang terakhir DPKAD Kota Bandung selaku yang bertugas untuk mengkoordinasikan dari semua SKPD – SKPD yang ada di Kota Bandung melakukan rapat dan mensosialisasikan kekurangan aplikasi SIMDA-BMDv1 kepada pihak yang memegang/membuat program aplikasi SIMDA-BMD untuk

menjadi lebih baik agar tidak mengalami gangguan saat proses maupun saat melihat hasil laporannya.